



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR : 21 / HK.03.2-SK/3174/KPU-Kot/X/2021

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, maka perlu dibentuk Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

b. bahwa pembentukan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.1/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Sekretaris;
6. Anggota.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
  - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
  - c. Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
  - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
  - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - b. Menyusun dan melaporkan kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi kepada penanggungjawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
  - b. Membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
  - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
  - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
  - b. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS Kota Jakarta Selatan;

- c. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- e. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- h. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga;
- i. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- j. Menyusun laporan atas Pelaksanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2021.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

KELIMA : Susunan Keanggotaan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Putusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,**

ttd

**AGUS SUDONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Sub Koordinator Hukum,

  
  
Atika

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan  
Nomor : 21 / HK.03.2-SK/3174/KPU-Kot/X/2021  
Tentang : Pengembangan dan pengelolaan satuan tugas Unit pengendalian gratifikasi Di lingkungan komisi pemilihan umum kota jakarta selatan tahun 2021.

**STRUKTUR / SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

- PENGARAH** : 1. AGUS SUDONIO  
(Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan)  
2. AHMAD BARIZI  
(Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan)  
3. DODY WIJAYA  
(Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan)  
4. FAHMI ZIKRILLAH  
(Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan)  
5. YUSUF SATYANEGARA  
(Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan)
- KETUA** : SUSILA HERY PRABAWA  
(Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan)
- SEKRETARIS** : ATIKA  
(Sub Koordinator Hukum)
- ANGGOTA** : 1. PODANG WAHYODIDORO  
(Sub Koordinator Teknis dan Hupmas);  
2. ARTANTY ARSYAD  
(Analisis Hukum);  
3. WIWIT TUSWANTI  
(Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,**

ttd

**AGUS SUDONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Sub Koordinator Hukum,

  
  
Atika